



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS MUHAMAD YASIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 693720

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	461.700.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m ² /115 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 461.700.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	101.400.000
1. MOTOR, HONDA NF 125 D Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOTOR, HONDA NC12A1CFA/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.400.000		
3. MOBIL, TOYOTA SRF/0052/AE92-5/89 Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI SPLASH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	138.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.308.848
F. HARTA LAINNYA	Rp.	46.111.550
Sub Total	Rp.	752.120.398
III. HUTANG	Rp.	6.403.700
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	745.716.698

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.